

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi kepustakaan, selain mendapatkan teori-teori berkaitan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel penelitian. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian terkait program pencatatan akta kematian bukanlah yang pertama kali dilakukan, sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang melakukan kajian tentang ini di berbagai tempat maupun organisasi publik. Adapun 5 penelitian terdahulu yang terdiri sebagai berikut:

Penelitian pertama, oleh Nindya Alvina dengan judul Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kinerja program pendaftaran akta kematian di Semarang masih rendah dibandingkan dengan program lainnya, yaitu sebesar 20,60 %. Kendala lain yang ditemukan dalam pelaksanaannya adalah upaya sosialisasi yang belum maksimal, sumber daya yang kurang memadai, tingkat kepatuhan yang rendah, serta *miss communication* dari pelaksana kebijakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya, memaksimalkan upaya peningkatan kinerja, melakukan peninjauan langsung, menjalin kerjasama dengan pihak terkait, dan meningkatkan kualitas fisik yang sudah ada.

Penelitian kedua, Oleh Shahnaz Dyah Purwanto yang berjudul Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat capaian dari proram pencatatan akta kematian di Kota Semarang masih rendah jika dibandingkan dengan program lainnya yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, yaitu sebesar 31,51%. Ditemukan hal – hal yang menghambat berjalannya program yaitu kurangnya komunikasi dan sumber daya manusia yang

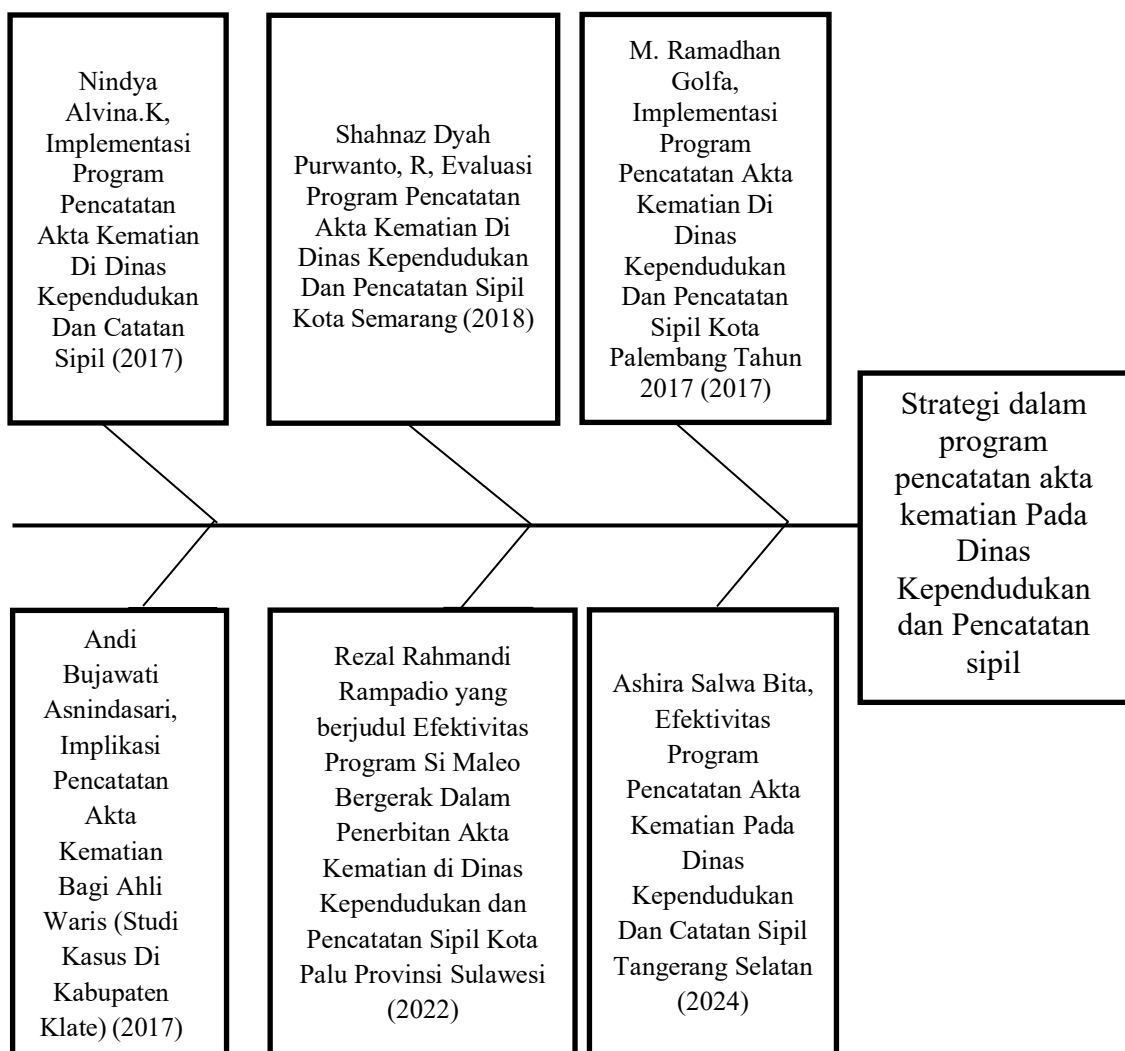
kurang memadai. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah memperbanyak sumber daya manusia dan memperbaiki pola komunikasi.

Penelitian ketiga, oleh Andi Bujawati Asnindasari yang berjudul Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten). Dimana hasil dari penelitian ini didapatkan dianalisis berdasarkan Undang-Undang yang terkait dengan pencatatan akta kematian dan ahli waris serta menggunakan asas-asas pencatatan sipil, teori-teori tentang ahli waris, fenomenologi hukum, dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akta kematian ini sangatlah penting dan membawa implikasi yang cukup luas. Pencatatan akta kematian penting sebagai bukti otentik tentang peristiwa kematian seseorang yang membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia.

Penelitian Keempat, oleh M. Ramadhan Golfa dengan judul Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017.

Penelitian kelima, oleh Moh. Rezal Rahmandi Rampadio yang berjudul Efektivitas Program Si Maleo Bergerak Dalam Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Si Maleo Bergerak, secara keseluruhan telah berjalan dengan efektif walaupun belum maksimal karena dari 14 indikator yang ada yaitu Hasil, Jangkauan Program, Kesesuaian dengan Persyaratan, Perbaikan Berkelanjutan, Bebas dari Kerusakan atau Cacat, Pemenuhan Kebutuhan Pelanggan, Faktor Waktu, Pemanfaatan Sumber Daya, Strategi, Tujuan dan Objektivitas, Visi, Kecepatan Layanan, Sarana dan Prasarana, dan Kenyamanan Memperoleh Layanan, terdapat 1 yang belum terpenuhi oleh dengan baik yaitu indikator Jangkauan Program belum semua masyarakat yang dapat menerima pelayanan terutama masyarakat yang berada di pelosok Kota Palu dikarenakan sosialisasi yang belum maksimal dan susah nya akses untuk menuju rumah masyarakat yang berada di pelosok Kota Palu Terdapat beberapa hambatan dalam pelayanan penerbitan akta kematian di Kota Palu.

hambatan tersebut seperti kurangnya pemahaman masyarakat Kota Palu tentang pentingnya kepemilikan akta kematian dan akses pelayanan yang Sulit. Untuk mengatasi hambatan tersebut adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai diantaranya yaitu, Sosialisasi kepada masyarakat dan mendorong agar dilakukannya pembangunan akses jalan yang memadai ke daerah pelosok-pelosok Kota Palu.



Gambar 2.1 Diagram Fishbond
Sumber: Diolah peneliti, 2023

Berdasarkan diagram *fishbone* diatas dari kelima penelitian terdahulu tujuan dari penelitiannya saling berkesinambungan dengan variabel penelitian yang lainnya yaitu sama dalam mengkaji progam pencatatan akta kematian. Kebaharuan penelitian ini ialah penelitian ini menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menjawab semua apa yang di perlukan pada penelitian ini serta membahas efektivitas program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Nindya Alvina (2017)	Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menjadi pendukung Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Ketidakberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yaitu sala satunya ada Sikap masyarakat sebagian besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan walaupun secara teori masyarakat sudah mengetahui seberapa penting tingkat kewajiban mengurus dan memiliki dokumen kependudukan.	Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana dilakukan Tentang implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2	Shahnaz Dyah Purwanto (2018)	Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas	penilaian evaluasi program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang menggunakan Kelima indikator,	Penelitian terdahulu ini membahas tentang Tentang evaluasi Program

		Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	antara lain (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) pemerataan, (5) responsivitas. Berdasarkan kelima indikator tersebut, pelaksanaan program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah berjalan cukup baik terutama pada indikator efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas.	Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
3	Andi Bujawati Asnindasari (2017)	Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)	Kesimpulan pada penelitian ini bahwa pencatatan akta kematian sangat penting dan membawa implikasi yang cukup luas. Pencatatan akta kematian ini penting sebagai bukti otentik tentang peristiwa kematian seseorang yang membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia. Bagi ahli waris yang telah mencatatkan akta kematian dapat menggunakan akta kematian untuk berbagai kepentingan seperti: mengurus warisan, klaim asuransi, pensiunan, perbankan, tunjangan kecelakaan, dll. Jadi pentingnya pencatatan akta kematian karena ahli waris perlu bukti otentik yang menunjukkan bahwa anggota keluarganya tersebut benar-benar telah meninggal dunia, agar bisa segera mengurus kepentingan-kepentingannya.	Penelitian terdahulu ini membahas tentang pentingnya pencatatan akta kematian untuk kepentingan ahli waris. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pentingnya mendaftarkan akta kematian untuk data kependudukan.
4	M. Ramadhan Golfan (2017)	Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017	Kesimpulan pada penelitian ini dijelaskan bahwa pada implementasi etidakberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu salah satunya ada sikap masyarakat sebagian	Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana dilakukan Tentang implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sedangkan penelitian ini

			besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan walaupun secara teori masyarakat sudah mengetahui seberapa penting tingkat kewajiban mengurus dan memiliki dokumen kependudukan.	membahas tentang efektivitas Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
5	Moh Rezal (2022)	Efektivitas Program Si Maleo Bergerak dalam Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Si Maleo Bergerak Dalam Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan telah berjalan dengan efektif walaupun belum maksimal karena dari 14 indikator dan terdapat 1 yang belum terpenuhi oleh dengan baik yaitu indikator Jangkauan Program belum semua masyarakat yang dapat menerima pelayanan terutama masyarakat yang berada di pelosok Kota Palu dikarenakan sosialisasi yang belum maksimal dan susah akses untuk menuju rumah masyarakat yang berada di pelosok Kota Palu Terdapat beberapa hambatan dalam pelayanan penerbitan akta kematian di Kota Palu, hambatan tersebut seperti: kurangnya pemahaman masyarakat Kota Palu tentang pentingnya kepemilikan akta kematian dan akses Pelayanan yang Sulit.	Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana dilakukan Tentang efektivitas Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan fokus program sendiri Sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat penelitian sebelumnya yang juga melakukan pembahasan terkait variabel program pencatatan akta kematian. Suatu penerapan program dari masing-

masing instansi pemerintah sebagai masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti saat ini, yakni efektivitas program pencatatan akta kematian. Hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu kesamaan dalam variabel penelitian yang membahas mengenai program pencatatan akta kematian. Adapun perbedaannya terdapat temuan pisau analisis yang berbeda pada fokus yang diteliti dan juga teori yang digunakan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. (1991) Gedeian dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas)

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya, adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Efektivitas pada dasarnya suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Walaupun seseorang melakukan perbuatan untuk maksud tertentu dan memang dikehendaki maka pekerjaan tersebut dinyatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang telah dikehendaki sebelumnya.

Siagian dalam Ibrahim (2010) memberikan pengertian efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan. Efektivitas menurut Siagian adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan artinya pelaksanaan

suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Effendy (2010) mengemukakan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Selain itu, Mahsun (2006) menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Adapun Mulyadi (2016) mengemukakan efektivitas sebagai tahapan untuk dapat mencapai satu tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Mahmudi (2005) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dari kriteria efektivitas berdasarkan waktu munculah istilah kriteria jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kriteria jangka pendek adalah kriteria yang merujuk pada hasil tindakan yang dilakukan dalam waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah dapat diterapkan ketika mempertimbangkan efektivitas dari suatu kelompok individu atau organisasi untuk suatu periode waktu yang lebih lama, mungkin lima tahun. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa efektivitas merupakan cara untuk mengukur program atau suatu kegiatan sudah mencapai tujuan dan sasaran akhir program yang telah ditetapkan ukuran efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran efektivitas mesti adanya kepuasan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran efektivitas adanya saring memiliki dengan tingkat yang tinggi. Apabila

hanya pekerjaan yang betul (sesuai dengan rencana) yang dikerjakan, maka akan muncul efektivitas.

2.2.2 Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. program juga bisa diartikan sebagai rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Siagian mengatakan bahwa penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu. Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.

Makmur (2015) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implemementasi, dan hasil yang di capai.

Menurut Suharsimi Arikunto (2012) mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedangkan menurut Farida Yusuf Tayibnapi (2013) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam melaksanakan sebuah program perlu adanya sasaran, manfaat dan tujuan tertentu untuk dapat dikatakan program tersebut berhasil.

Kayatomo dalam, Rukmana (2013) mendefinisikan program sebagai rangkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat suatu tujuan. Menurut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana (2009) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.
4. Menurut Primahendra dalam Wulandari (2018:9) Pelaksanaan program

Merupakan sebuah sistem yang bekerja dengan adanya berbagai dukungan seperti sarana prasarana, pendanaan, partisipasi sasaran, keaktifan peserta program, serta adanya timbal balik dengan pihak pelaksana. Pemanfaatan dukungan secara maksimal akan berimplikasi pada dampak positif bagi sasaran setelah dilaksanakan program. Program dikatakan efektif apabila memenuhi tujuan yang telah ditetapkan serta menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program.

2.2.3 Efektivitas Program

Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh berbagai pakar memiliki banyak kesamaan pendapat dan versi. Efektivitas dapat dikatakan sebagai unsur yang penting dalam penerapan program agar tercapainya tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam bahasa Inggris, efektifitas disebut dengan *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan atau dibuat berhasil dengan baik. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian efektivitas.

Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public maka suatu kegiatan dikatakan efektif

jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dalam menilai efektivitas program, terdapat berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

1. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan.
4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari

sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

5. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut.

Menurut Campbell (1989) mengemukakan bahwa efektivitas program dapat dijalankan melalui keahlian operasional dalam melakukan program kerja yang sesuai dengan tujuan, efektivitas secara komprehensif dimaksud sebagai tingkat keahlian suatu organisasi sanggup melakukan tugas pokok ataupun mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Campbell (dalam Mutiarin, 2014) menyatakan pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program, yaitu efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Keberhasilan sasaran, yaitu efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, artinya efektivitas dapat diukur dengan ketercapaian *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kepuasan terhadap program, yaitu kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, sehingga dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.
4. Kesesuaian input dan output, yaitu pada efektivitas tingkat *input* dan *output* dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran. Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.
5. Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh, yaitu keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Penilaian efektivitas ini dapat menjadi hasil akhir terkait kelanjutan program tersebut, dalam mengukur tingkat efektivitas, teori yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu teori dari Sutrisno (2007) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dengan menggunakan teori dari Sutrisno dalam mengukur efektivitas. Pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno (2007) yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.

2. Tepat Sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
3. Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.
4. Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
5. Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahannya sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagoian, Efektivitas program adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitas.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Sondang P. Siagian (2011) menjelaskan kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak antara lain:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan disediakan organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan padatujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya menurut Lubis dan Martani Huseini (1987) menyatakan efektifitas program sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing- masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (1987), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan efektivitas menurut Budiani (2007) menyatakan efektivitas program sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program, Yaitu keadaan dimana program yang dijalankan dengan sasaran yang ingin dicapai sesuai. Ketepatan sasaran lebih berorientasi pada program terhadap individu yang mana ketepatan sasaran dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan suatu program. Jika program tersebut sesuai dengan sasaran, maka program tersebut berjalan dengan baik, tetapi jika program tersebut tidak sesuai dengan sasaran maka akan menghambat berjalannya program tersebut.
2. Sosialisasi Program, Yaitu kemampuan agar pelaksana dalam memberikan informasi kepada sasaran program. Keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh pengetahuan tentang program tersebut. Informasi yang diberikan kepada sasaran harus tersampaikan dengan baik supaya program tersebut dapat dicapai tujuannya dengan sasaran yang tepat.
3. Tujuan Program, Yaitu sejauh mana hasil yang didapatkan dari tujuan yang ingin dicapai dengan kesucian sasaran yang telah ditentukan.
4. Pemantauan Program, Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh agen pelaksana untuk mengawasi program tersebut agar tetap pada tujuan awal dibentuknya suatu program.

2.2.4 Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan pengertian administrasi menurut S.P.Siagian (1990) adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang mana bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat

sebuah identitas seseorang atau masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan cabang dari pusat atau bagian dari pemerintahan yang mana setiap kabupaten mempunyai instansi ini, tujuannya adalah agar mempermudah masyarakat dalam membuat identitas. Identitas itu bisa berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang mana identitas itu bertujuan agar pemerintah mengetahui data penduduk disuatu tempat tersebut.

Gagasan untuk menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukung masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang pelayanan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan kartu tanda penduduk, surat keterangan keluarga, akta kelahiran, dan lain –lain, dewasa ini belum memuaskan. masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap sosial dan ekonomi.

Dengan memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau

perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara.

Dengan adanya sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

2.2.5 Akta Kematian

Akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan di tanda tangani. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, suatu surat harus ditanda tangani.

Yang dimaksud dengan penanda tangan ialah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Nama tersebut juga harus ditulis oleh si penanda tangan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Dalam bidang perdata, setiap perjanjian seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, asuransi, penghibahan, perkawinan, kelahiran, pengangkatan anak, bahwa kematian pun sengaja dicatat atau dituliskan dalam bentuk akta. Hal ini dilakukan agar apabila suatu ketika terjadi sengketa yang timbul atas peristiwa tersebut, akta dapat dijadikan alat bukti terkait transaksi atau peristiwa hukum yang terjadi.

Unsur akta meliputi tulisan; dengan sengaja dibuat; untuk alat bukti; adanya hubungan hukum; ditanda tangani. Ada dua macam akta, yaitu :

1. Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, panitera pengadilan, pegawai pencatat perkawinan. Akta

otentik terdiri dari dua macam, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat di hadapan pejabat.

2. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. Didalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi, yaitu fungsi akta dapat berupa, syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai alat pembuktian

Akta kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan.

Disebut sebagai akta otentik karena akta kematian ini dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari yang berkepentingan.

Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk akta kematian. Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Disebut sebagai akta otentik karena akta kematian ini dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari yang berkepentingan.

2.2.6 Faktor-Faktor Penting Pembuatan Akta Keamtian

Akta kematian diterbitkan untuk warga negara yang telah wafat. Dengan diterbitkan akta kematian baginya, identitas atau data warga negara tersebut akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data kependudukannya.

Pencatatan kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap warga negara yang telah meninggal memiliki beberapa manfaat sekaligus, yaitu:

- 1) Mencegah data Almarhum disalah gunakan
Dengan mengurus akta kematian, Anda membantu orang yang Anda cintai agar datanya tidak dapat disalah gunakan.
- 2) Mengurus penetapan Ahli Waris
Agar harta kerabat Anda bisa diserahkan kepada ahli waris secara sah, maka Anda membutuhkan akta kematian kerabat Anda agar jelas bahwa pemilik harta tersebut sudah meninggal dan hartanya bisa diwariskan.
- 3) Mengurus Klaim Asuransi
Dana klaim dari asuransi tidak akan bisa turun jika Anda tidak melampirkan persyaratan yang dibutuhkan. Dan salah satu syarat pengurusan klaim asuransi adalah dengan melampirkan akta kematian orang yang telah meninggal tersebut.
- 4) Persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali bagi suami/istri Almarhu
Jika pasangan meninggal, istri atau suami yang ditinggalkan bisa melakukan pernikahan kembali. Akan tetapi, untuk bisa melakukan pernikahan yang sah secara hukum, istri atau suami yang ditinggalkan perlu melampirkan akta kematian dari suami lamanya dalam proses perkawinan kembali.
- 5) Memastikan Keakuratan Data Penduduk
Data ini nantinya juga akan digunakan untuk mengetahui siapa saja penduduk yang masih memiliki hak suara saat momen seperti pemilihan umum. Jangan sampai karena tidak dilaporkan, orang yang sudah meninggal justru masih memiliki hak suara.

Pelayanan Pencatatan Akta Kematian Pelayanan pencatatan akta kematian merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemeluhan kebutuhan pelayanan penentatan terhadap suatu peristiwa kematian sesuai dengan peraturan peundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk.

Pelayanan pencatatan akta kematian merupakan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhubungan dengan membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan masyarakat atas akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap suatu peristiwa kematian seseorang. Adapun ketentuan dalam pencatatan akta kematian sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh instansi terkait berdasarkan visum Rumah Sakit Puskesmas dengan mencantumkan diagnosa pada Dinas.
2. Setiap kematian wajib dicatatkan oleh (orang tua/ suami istri anak atau kuasanya/Ketua RT) kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dengan melampirkan persyaratan pencatatan kematian sebagai berikut:
 - a. Formulir surat keterangan kematian diketahui lurah.
 - b. Formulir pelaporan kematian.
 - c. Pengantar RT/RW permohonan membuat akta kematian asli atau
 - i. fotokopi dilegalisir.
 - d. Surat keterangan kematian dari kelurahan asli atau fotokopi dilegalisir.
 - e. Surat kematian dari dokter atau paramedis asli atau fotokopi dilegalisir.
 - f. Fotokopi identitas kependudukan (KK dan KTP)
 - g. Fotokopi yang dilegalisir surat nikah/akta perkawinan apabila yang meninggal sudah menikah.
 - h. Fotokopi KTP pelapor dan fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi.
 - i. Bagi yang belum menikah lampirkan fotokopi yang dilegalisir akta kelahiran dari yang meninggal.
 - j. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasakan.
3. Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar Indonesia, wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah kembali ke Indonesia dengan melampirkan:
 - a. Sertifikat kematian dari negara dimana kematian terjadi

- b. Passport
- c. Akta kelahiran dan akta perkawinan orang tua atau suami/istri
- d. Akta kelahiran anak
- e. Surat pengantar dari kelurahan
- f. KTP dan kk orang tua/suami/istri/anak
- g. KTP 2 (dua) orang saksi yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membagi dua bentuk pelayanan pencatatan akta kematian yaitu:

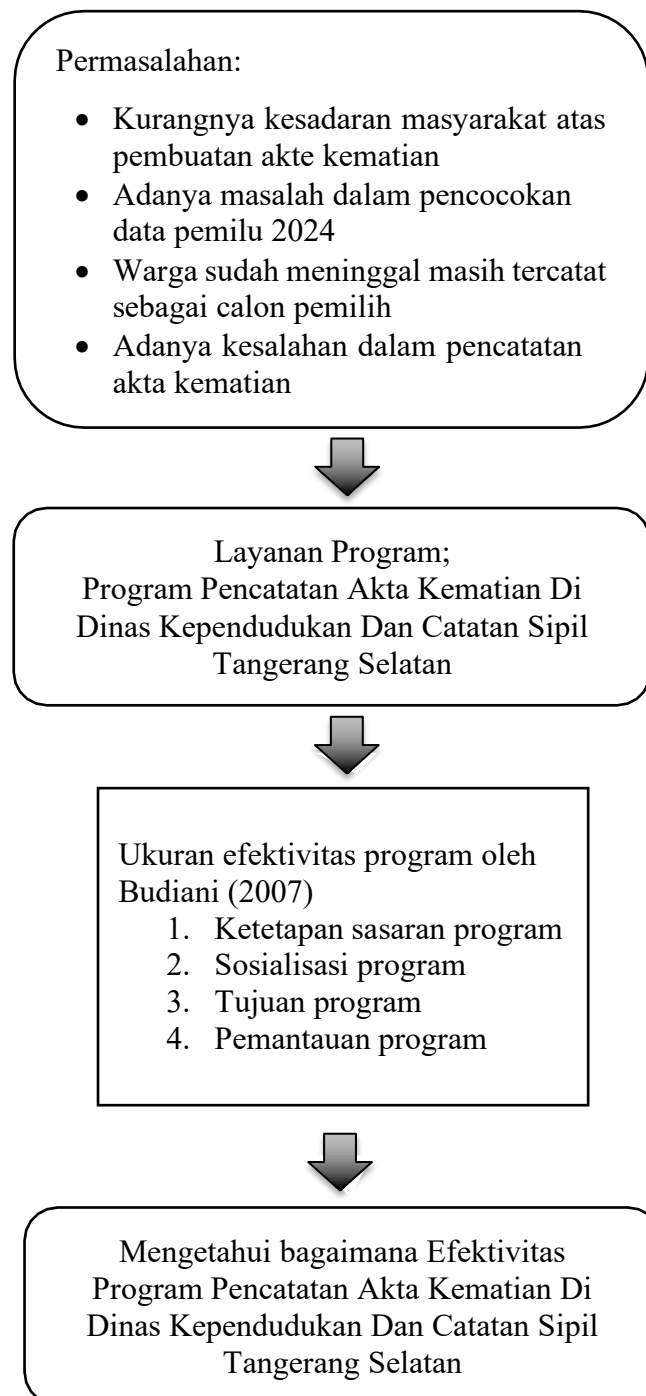
1. Pelayanan pencatatan aka kematian reguler/statis
Adalah pelayanan pencatatan aka kematian dengan cara keluarga atau ahli waris mendatangi langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan pengurusan aka kematian.
2. Pelayanan pencatatan akta kematian jemput bola/keliling
Adalah pelayanan pencatatan aka kematian dengan cara pihak DISDUKCAPIL mendatangi warga baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dengan layanan mobil keliling administrasi kependudukan.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dtuju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapt menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Efektivitas program dapat dijalankan oleh kemampuan operasional di dalam menyelenggarakan program-program kerja yang selaras dengan tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu, secara komprehensif.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017). Dalam penelitian ini, fokus yang

diteliti adalah efektivitas program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Diolah peneliti, 2023

Maka untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan program pencatatan akta kematian, penelitian ini menggunakan teori menurut Budiani (2007) yang menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Sejauh mana program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat mempermudah proses pelayanan pencatatan akta kematian di Kota Tangerang Selatan.

2. Sosialisasi Program

Bagaimana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan melakukan sosialisasi program pencatatan akta kematian di Kota Tangerang Selatan.

3. Tujuan Program

Sejauh mana kesesuaian antara hasil yang didapatkan atas pelaksanaan program pencatatan akta kematian dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Bagaimana proses pemantauan terhadap berapa banyak masyarakat yang telah mendaftarkan akta kematian, dan apakah sudah mencapai target realisasi tahunan.